

Sektor informal: peninjauan kembali dalam perspektif konseptual

Informal sector: conceptual perspective review

D A Khairi¹ dan A Marsoyo¹

¹Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Corresponding author's email: dhoniarya2018@gmail.com

Abstrak. Pada tahun 1972, ILO sebagai institusi ketenagakerjaan internasional memperkenalkan tujuh kriteria konsep sektor informal. Kemunculan konsep sektor informal tersebut lahir di tengah geliat pembangunan negara dunia ketiga yang semangat dengan konsep pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Memasuki dekade 2000-an dan 2010-an, eksistensi sektor informal tetap dirasakan keberadaannya di berbagai negara. Namun, keberadaannya di tengah konsep pembangunan tidak hanya sekedar mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lebih mengedepankan konsep pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini memiliki tujuan meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculannya hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Hal ini menggunakan metodologi analisis isi induktif-kualitatif yang selanjutnya 28 kasus penelitian sektor informal pedagang kaki lima di berbagai negara dianalisis ke dalam unit-unit informasi, kategori, dan konsep dalam konteks teori pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan adanya evolusi konsep sektor informal seiring dengan evolusi teori pembangunan. Konsep sektor informal mengalami evolusi dari dekade 1970-an hingga 2010-an yang ditandai dengan semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan. Bentuk evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan antara konsep sektor informal menurut ILO (1972) yang terdiri dari tujuh kriteria dengan konsep sektor informal dekade 2010-2019 yang terdiri dari 16 kriteria.

Kata Kunci: Concept of Informal Sector; Development Concept; Street Vendors

Abstract. In 1972, the ILO as an international labor institution introduced seven criteria for the concept of the informal sector. The concept of the informal sector emerged in the dynamics of third world development revolving around industrialization. During the 2000s and 2010s, the existence of the informal sector remained. It was no longer in the perspective of economic growth, but more of inclusive and sustainable development. This study aims to review the concept of the informal sector through times in the context of development theory. Using the inductive-qualitative content analysis methodology, 28 cases of the informal sector street vendors in various countries were analyzed into information units, categories, and concepts in the context of development theory. The results show that the concept of the informal sector has evolved along with the evolution of development theory. The concept of informal sectors have undergone significant transformation from the 1970s to the 2010s marked by the increasing number of informal sector concepts that have a direct relationship with development theory. By the latest couple of decade, the evolution shown by the difference of the criteria, the seven criteria from ILO (1972) has been transformed to 16 criteria in latest literatures.

Keywords: Concept of Informal Sector; Development Concept; Street Vendors

1. Pendahuluan

Usaha pertama kali untuk mendefinisikan dan mengumpulkan data sektor informal dimulai Hart (1971), dalam studi penelitian etnografis di Kota Nima dan Accra di Ghana-Afrika tentang jenis dan bentuk peluang pendapatan informal berskala kecil di luar pekerjaan formal. Pada tahun 1972, ILO sebagai lembaga ketenagakerjaan internasional mempopulerkan istilah tersebut melalui laporan resminya yang bertajuk *World Employment Program (WEP)* tentang aspek pembangunan dan kesempatan kerja di kota-kota besar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin [1,2]. Menurut ILO [3], konsep sektor informal terdiri atas 7 kriteria yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar, seperti dapat dilihat pada Tabel 1. Kegiatan sektor informal sebagian besar diabaikan, jarang didukung, sering diatur, atau dilarang oleh pemerintah.

Apabila dihitung dari awal kemunculannya hingga saat ini, pendefinisian konsep sektor informal oleh ILO telah memasuki dekade yang ke-5. Perlu dicermati secara lebih mendalam bahwa konsep pembangunan pada dekade 1970-an adalah konsep yang berkembang dari dekade 1950-an dan dekade 1960-an yang sangat kuat dengan pengaruh industrialisasi demi mengejar pertumbuhan ekonomi. Teori industrialisasi substitusi impor *center-periphery* dikenalkan oleh Prebisch pada tahun 1950-an. Lalu, teori dualisme modern (kapitalis)-tradisional (prakapitalis) dikenalkan oleh Boeke pada tahun 1953 [4] dan teori penyerapan kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dikenalkan oleh Arthur Lewis pada tahun 1954 [5] dan Fei-Ranis pada tahun 1964 [6]. Kemudian, teori tahap pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi dikenalkan oleh Rostow pada tahun 1960-an. Pada tahun 1969, Todaro mengenalkan teori model migrasi desa-kota yang diakibatkan oleh proses industrialisasi di perkotaan [7].

Tahun 1970an terdapat teori sistem perekonomian dunia atau model *core-semiperiphery-periphery* dikenalkan oleh Wallerstein pada tahun 1974 [8].

Tabel 1. Konsep sektor formal dan sektor informal menurut ILO (1972).

Kriteria	Sektor Informal	Sektor Formal
Kemudahan masuk	Mudah dimasuki.	Sulit dimasuki.
Bahan baku	Ketergantungan pada sumber daya lokal.	Sering mengandalkan sumber daya luar negeri (impor).
Struktur usaha	Usaha yang dimiliki keluarga.	Usaha dimiliki perusahaan.
Skala usaha	Usaha berskala kecil.	Usaha berskala besar.
Adaptasi teknologi	Menggunakan teknologi padat karya yang diadaptasi.	Menggunakan teknologi padat modal dan seringkali diimpor.
Keterampilan	Keterampilan yang diperoleh di luar sistem sekolah formal.	Keterampilan diperoleh melalui pendidikan formal, seringkali ekspatriat.
Bentuk pasar	Pasar yang tidak diatur dan kompetitif.	Pasar yang dilindungi (melalui tarif, kuota dan lisensi perdagangan).

Pada pertengahan dekade 1970-an hingga 1990-an, muncul teori redistribusi pembangunan dan liberalisasi ekonomi yang merespon kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai dampak industrialisasi di berbagai negara. Pada tahun 1974, Chenery menelurkan konsep redistribusi pembangunan melalui pengalokasian belanja pelayanan dasar seiring dengan pertumbuhan ekonomi [9,10]. Pada tahun 1977, Adelman mengenalkan teori redistribusi sebelum pertumbuhan,, yaitu pembangunan yang didahului redistribusi lahan dan investasi pendidikan sebelum melakukan pertumbuhan ekonomi [9]. Pada tahun 1976, muncul strategi *basic need approach* (BNA), yaitu strategi pemenuhan kebutuhan dasar untuk mengatasi kemiskinan secara langsung [11–13]. Pada tahun 1989, Hernando de Soto mengenalkan konsep pembangunan liberalisasi ekonomi, yaitu upaya legalisasi sektor ekstralegal atau sektor informal di negara berkembang untuk memasuki jaringan kapitalisme global [14].

Memasuki dekade 2000-an hingga dekade 2010-an, teori dan strategi pembangunan terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2000, Hernando de Soto kembali mengenalkan teori liberalisasi ekonomi dengan tujuan melakukan formalisasi atau legalisasi sektor informal ke dalam sektor formal [15]. Pada tahun ini juga muncul konsep pembangunan sebagai kebebasan dengan 5 jenis instrumen kebebasan dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan dengan mencapai pembangunan yang berkemajuan [16]. Pada tahun yang sama, PBB menetapkan 8 tujuan pembangunan milenium global yang dikenal sebagai *millenium development goals* (MDGs) dengan tujuan utama mengurangi kemiskinan [17]. Pada tahun 2015, PBB meluncurkan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau lebih dikenal dengan *sustainable development goals* (SDGs) yang lebih komprehensif dan dari MDGs untuk mengatasi kemiskinan yang belum sepenuhnya teratasi [18]. Pada tahun 2016, PBB mengenalkan agenda perkotaan baru atau *new urban agenda* (NUA) dengan tujuan

mengimplementasikan misi ke-11 SDGs tentang misi permukiman, yaitu mencanangkan agenda kota-kota yang inklusif kepada semua golongan, aman, dan kuat sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan [19,20].

Dapat dikatakan bahwa dari dekade 1970-an hingga dekade 2010-an telah terjadi evolusi konsep pembangunan. Konsep pembangunan pada dekade 1950-an hingga awal 1970-an hanya terpaku pada pertumbuhan ekonomi saja. Mulai pertengahan dekade 1970-an hingga 1990-an, mulai muncul teori pembangunan yang merespon masalah kemiskinan dan keterbelakangan di negara dunia ketiga dengan konsep distribusi pembangunan dan liberalisasi ekonomi. Memasuki dekade 2000-an hingga 2010 merupakan era pembangunan komprehensif dan berkelanjutan dengan konsep pembangunan yang tidak hanya berpijak pada konsep pertumbuhan ekonomi dan distribusi pembangunan, tetapi juga bertumpu pada konsep pembangunan yang mengakar pada aspek manusia dan lingkungan.

Evolusi teori pembangunan tidak selalu membawa dampak kemajuan, tetapi banyak diwarnai dengan berbagai dampak sampingan yang ditimbulkan. Salah satu dampak sampingan dari fenomena pembangunan, yaitu hadirnya sektor informal. Kemunculan sektor informal telah berlangsung sejak lama di berbagai negara. Kehadiran sektor informal lahir dari ketidaksempurnaan praktek pembangunan yang menyebabkan urbanisasi, kemiskinan, dan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga [2,21]. Sektor informal perlahan menghilang di negara maju, tetapi semakin berkembang di perkotaan negara berkembang dan negara miskin di Afrika, Asia, dan Amerika Latin [22]. Salah satu bagian dari sektor informal yang sudah dikenal sejak lama adalah pedagang kaki lima [23]. Pekerjaan ini sering disebut sebagai bentuk mata pencaharian kuno yang ada di seluruh perkotaan dunia [22–24].

Sektor informal PKL telah menjadi fokus banyak peneliti dari berbagai lintas ilmu. Keberadaan sektor informal PKL dapat dijelaskan dari aspek demografis, legalitas, dan organisasi [25]. Sektor informal juga mudah dimasuki karena menawarkan kebebasan dalam beraktivitas dan tidak membayar pajak [26]. Pada aktivitasnya, sektor informal memiliki hubungan sosial, ekonomi, dan spasial dengan sektor formal [27]. Selain itu, juga terdapat hubungan sektor informal dengan pemerintah dalam penerapan jaminan sosial [28]. Sektor informal seringkali mengakses kredit rentenir, meskipun pada perkembangannya dapat mengakses kredit ke lembaga formal seperti bank, koperasi, lembaga keuangan mikro, kelompok swadaya, LSM, dan serikat pekerja [29].

Keberadaan sektor informal berimbas pada kebijakan pemerintah kota, baik praktek penolakan dan praktek pengintegrasian [30]. Sektor informal dapat dilihat sebagai sebuah strategi untuk bertahan hidup dalam keterbatasan pekerjaan dan kemiskinan yang ditinjau dari aspek kemudahan masuk, keruangan, fisik, aktivitas, struktur usaha, ekonomi, ketenagakerjaan, legalitas, sosial, bentuk pasar, dan keterampilan [31]. Sektor informal banyak dilakukan oleh orang dengan berbagai latar belakang profesi yang didasari oleh motivasi pendorong dan motivasi penarik [32]. Sektor informal menempati ruang kota dengan membentuk pola penyebaran yang memanjang mengikuti alur jalan dengan pola aktivitas menetap atau setengah menetap dengan mempertimbangkan berbagai faktor [33].

Berbagai penelitian telah mengungkapkan keberadaan sektor informal dari berbagai sudut pandang, tetapi belum ada kejelasan konsep yang digunakan untuk mendefinisikan sektor informal secara komprehensif. Selain itu, belum pernah ditemukan penelitian tentang peninjauan konsep sektor informal dari awal kemunculan hingga saat ini. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk meninjau kembali konsep sektor informal dari awal kemunculan hingga saat ini dalam konteks teori pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pemerintah dalam menangani sektor informal khususnya pedagang kaki lima di perkotaan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian analisis isi kualitatif dengan pendekatan induktif (*inductive-qualitative content analysis*). Pemilihan jenis pendekatan induktif didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk mencari *gap theory* yang bersifat terbuka. Penelitian analisis isi induktif menggunakan prinsip intertekstualitas, yaitu menganalisis teks dan menempatkannya ke dalam konteks tertentu [34]. Pada penelitian ini, konsep sektor informal dianalisis secara intertekstual ke dalam konteks teori pembangunan. Prosedur analisis isi induktif diawali dengan proses perumusan tujuan, menyeleksi kalimat ke dalam unit informasi, proses kategorisasi unit informasi ke dalam kategori yang sejenis, dan diakhiri dengan proses generalisasi kategori ke dalam konsep yang lebih umum [35].

Penelitian ini mengambil unit amatan berupa data sekunder yang berwujud publikasi ilmiah tentang sektor informal yang menempati ruang publik perkotaan, yaitu pedagang kaki lima di berbagai negara. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1971-1979 terdiri dari 3 kasus, yaitu kasus PKL di Asia Tenggara oleh Mc Gee & Yeung [36], kasus PKL di Indonesia oleh Hidayat [1], dan kasus PKL di Cali-Kolombia oleh Bromley [37]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1980-1989 terdiri dari 2 kasus, yaitu kasus PKL di Kota Umtata-Republik Transkei, Afrika oleh Nattrass [38], dan kasus PKL di Tangerang oleh Ramli [39]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 1990-1999 terdiri dari 11 kasus,, yaitu PKL di Indonesia oleh Firdausy dkk. [40]. Unit amatan sektor informal yang diambil pada dekade 2000-2009 terdiri dari 3 kasus,, yaitu kasus PKL global oleh Bromley [23], kasus PKL di Asia oleh Bhowmik [41], dan PKL di Indonesia oleh Pitoyo [42]. Kasus amatan sektor informal yang diambil pada dekade 2010-2019 terdiri dari 9 kasus, yaitu kasus PKL dalam lingkup global oleh Bhowmik [22], kasus PKL di Amerika Latin oleh Roever [25], kasus PKL di Kota Vung Tau-Vietnam oleh Walsh [26], kasus PKL di India oleh Bhowmik & Saha [29] dan Assan & Chambers [42], kasus PKL di Kota Ahmedabad-India dan Kota Lima-Peru oleh Roever & Skinner [30], kasus PKL di Kota Cali-Kolombia oleh Martinez dkk. [28], PKL di Afrika Selatan oleh Gamielidien & Niekerk [31], dan kasus PKL di Guangdong-China oleh Huang dkk. [32].

Unit analisis dalam penelitian ini berupa seluruh kalimat dalam unit amatan. Pengambilan sampel pada jenis penelitian induktif dilakukan dengan memilih teks yang relevan dengan tujuan penelitian dan dipandu oleh kisi-kisi teori atau biasa disebut pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) [34,35]. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik deskriptif eksploratif. Proses analisis

dibagi menjadi 5 dekade, yaitu dekade 1971-1979, dekade 1980-1989, dekade 1990-1999, dekade 2000-2009, dan 2010-2019 untuk melihat evolusi konsep sektor informal. Analisis difokuskan untuk mencari unit informasi, kategori, dan konsep pada tiap-tiap dekade dalam konteks teori pembangunan dan melihat evolusi konsep di dalamnya. Hasil analisis tersebut kemudian didialogkan dengan teori terdahulu untuk mengonfirmasi temuan penelitian.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

Penelitian ini berfokus pada konsep sektor informal dalam konteks teori pembangunan. Konsep awal sektor informal yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah konsep sektor informal yang diperkenalkan oleh ILO pada tahun 1972 dengan beberapa kriteria, yakni kemudahan masuk, asal bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Selain itu, juga menginduksi konsep lain di luar konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan.

3.1 Konsep sektor informal dekade 1971-1979

Mayoritas teori pembangunan dunia barat seperti model dualisme, kelebihan tenaga kerja, tahap pertumbuhan ekonomi, dan sistem perekonomian dunia yang berkembang dari dekade 1950-an hingga 1970-an sangat kuat dengan sistem kapitalisme yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi. Model pembangunan ini ketika diterapkan di negara berkembang banyak mengakibatkan pengangguran karena banyak negara berkembang memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di samping itu, industrialisasi di negara dunia ketiga tidak berjalan mulus karena ketergantungan modal dan teknologi dari negara maju.

Teori pembangunan dari dunia barat yang mengedepankan industrialisasi ketika diadopsi di banyak negara berkembang banyak memicu pengangguran, kesenjangan tingkat pendapatan, maraknya kemiskinan, dan tidak meratanya distribusi pembangunan karena tanpa mempertimbangkan aspek budaya, politik, maupun sumber daya alam yang tersedia di negara dunia ketiga. Terjadinya urbanisasi dari desa ke perkotaan dipicu oleh kemajuan sektor industri di kota, sementara pembangunan pertanian di pedesaan justru terabaikan. Seluruh keadaan ini menyebabkan penduduk kota dan para migran yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor formal mencoba mencari pendapatan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [42].

3.1.1 Konsep sektor informal dekade 1971-1979 dalam konsep ILO (1972). Pada dekade 1971-1979, ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh orang dengan berbagai latar belakang profesi [1], tidak membutuhkan keterampilan khusus, dan hanya membutuhkan sedikit modal [36]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan asal bahan baku, yaitu PKL menggunakan bahan baku yang berasal dari wilayah lokal dan bahan baku impor dari luar negeri [36].

Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan pengelolaan usaha dan kepemilikan usaha. Usaha PKL dapat dimiliki dan dikelola oleh individu [1,36,37], keluarga [1,36], maupun orang lain [36]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan besaran modal yang digunakan PKL tergolong sedikit sehingga komoditasnya sedikit dan perputaran usahanya juga kecil [1,36]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi sederhana dan padat karya [1]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan asal keterampilan yang dimiliki oleh PKL diperoleh di luar pendidikan formal [1]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan adanya bentuk persaingan dan jangkauan konsumen. PKL menghadapi berbagai bentuk persaingan ketat antara PKL dengan toko formal atau pedagang yang menjual barang sejenis [36,37]. PKL menjangkau konsumen dengan penghasilan rendah dan menengah [36,37].

3.1.2 Konsep sektor informal dekade 1971-1979 di luar konsep ILO. Selain konsep yang dikenalkan oleh ILO, pada dekade 1971-1979 juga ditemukan konsep sektor informal di luar konsep ILO, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 1). Konsep keruangan ditunjukkan dengan lokasi usaha, luas area, dan pola penyebaran. PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [36,37] dengan luas area usaha yang bervariasi dan memiliki 2 pola penyebaran, yaitu pola memusat (*market focus agglomeration*) dan pola memanjang (*street concentration*) [36].

Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, yaitu barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [36]. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah beragam sesuai dengan jenis dagangan baik secara menetap atau pun berkeliling [36]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas dengan menetap di suatu tempat atau bergerak secara berkeliling [36,37]. Jam kerja PKL tidak teratur dan tidak menentu [1] tergantung pada keinginan pedagang yang menyesuaikan ritme kegiatan masyarakat, aturan pemerintah, atau cuaca [36].

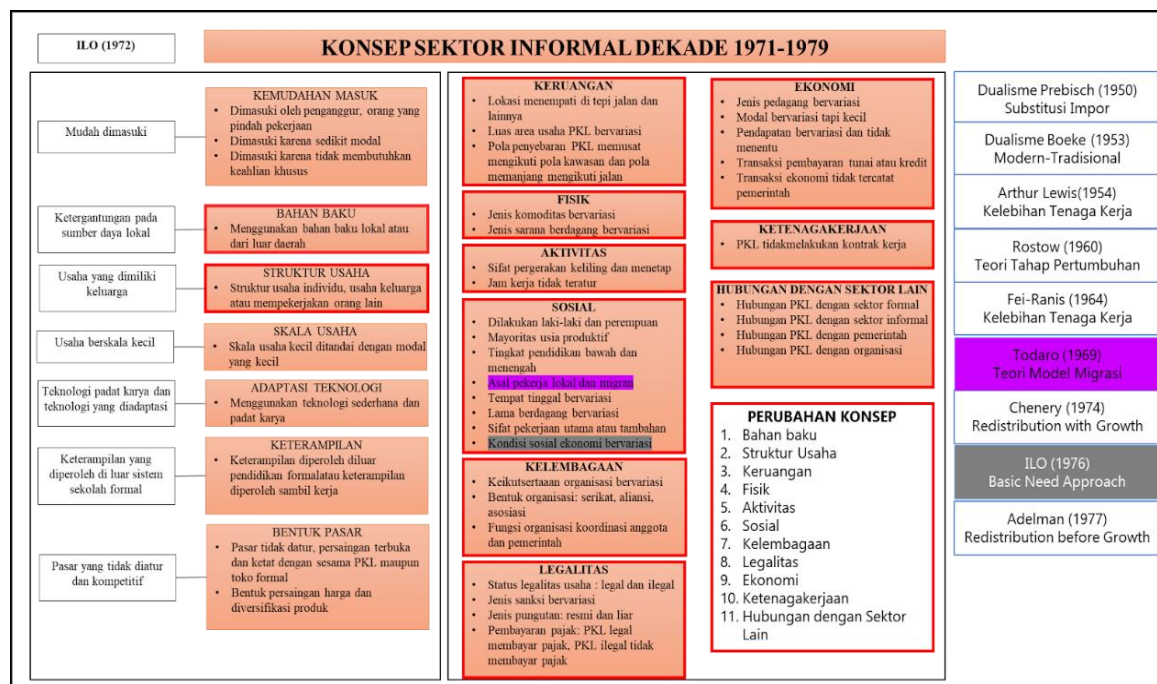
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [36,37]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif (*prime age*) [36] dan kebanyakan memiliki tingkat pendidikan yang rendah [36,37]. Orang-orang yang menekuni PKL merupakan para migran dan sebagian lainnya warga setempat [36,37]. PKL seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [36]. Mereka menekuni usahanya dengan lama yang bervariasi [36]. PKL seringkali menjadikan usahanya sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan untuk mencari penghasilan [36]. Kondisi kesejahteraan PKL berada dalam kondisi yang bervariasi, baik miskin dan non-miskin [36].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan fungsi organisasi. Terdapat PKL yang mengikuti organisasi ataupun tidak [1,36,37]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu serikat dan asosiasi pedagang [36]. Organisasi tersebut

berfungsi mengorganisir PKL, koordinasi dengan pemerintah dan kegiatan kredit [36]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [36,37]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi dan penertiban usaha yang beragam [1,36,37]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan liar) [36]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [37].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran, dan pembukuan keuangan. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang komisi (ritel dengan komisi tetap), pedagang tanggungan (ritel dengan komisi tidak tetap), dan pedagang independen (memproduksi komoditas sendiri) [37]. Modal usaha PKL tergolong kecil dan berubah-ubah, PKL seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal [1,36]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tetapi pendapatan rata-rata PKL dapat di bawah atau di atas upah formal [36]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [36]. Transaksi ekonomi yang dilakukan PKL tidak tercatat dalam statistik pemerintah [1]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan [1,36].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan adanya hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal) [36,37], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL) [36,37], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, konflik, bantuan ekonomi) [1,36], dan hubungan dengan organisasi (serikat, asosiasi) [36,37].



Gambar 1. Konsep sektor informal dekade 1971-1979.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 1971-1979 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan penduduk migran dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL. Hal ini sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan peluang ekonomi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.

3.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989

Dekade 1980-1989 merupakan masa-masa pembangunan yang tidak terlepas dari pengaruh berbagai macam penerapan kebijakan dan strategi pembangunan di dekade 1970-an yang sangat berfokus pada industrialisasi. Negara dunia ketiga tidak dapat menjalankan industrialisasi dengan baik. Industrialisasi yang pada awalnya direncanakan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dan menyerap semua penduduk ke dalam sektor formal ternyata tidak terjadi karena industrialisasi tidak berkelanjutan. Bahkan pada dekade 1980-an juga terjadi krisis ekonomi regional yang melanda negara-negara di Amerika Latin. Seluruh keadaan ini menyebabkan penduduk lokal dan para migran di kota yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor formal mencoba mencari pendapatan dengan berpartisipasi dalam kegiatan sektor informal [25].

3.2.1 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 dalam konsep ILO. Pada dekade 1980-1989, ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang muncul dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh berbagai latar belakang profesi [38,39]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan PKL memperoleh bahan baku berasal dari wilayah lokal dan memperolehnya dari berbagai sumber [38,39].

Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan PKL mengelola usahanya secara mandiri atau melibatkan orang lain [38,39]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan PKL merupakan usaha dengan modal kecil [38]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL mengandalkan teknologi sederhana dan tenaga padat karya [38]. Konsep keterampilan usaha ditunjukkan dengan PKL memperoleh keterampilan usaha dari luar pendidikan formal [38]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan bentuk pasar dan jangkauan konsumen. Bentuk persaingan yang

dihadapi oleh PKL dengan toko formal maupun dengan sesama pedagang yang menjual barang sejenis. PKL melayani masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah [38].

3.2.2 Konsep sektor informal dekade 1980-1989 di luar konsep ILO. Pada dekade 1980-1989 ditemukan kategori dan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang muncul dari unit amatan, yaitu keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 2). Konsep keruangan ditunjukkan dengan PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [38].

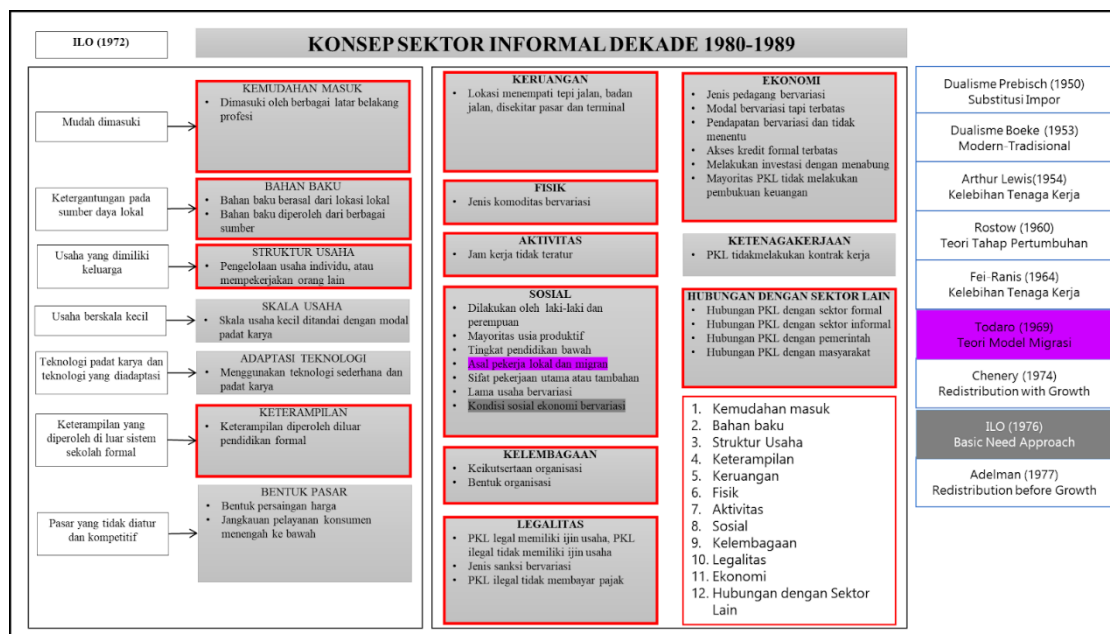
Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas aneka barang dan jasa dalam skala kecil [38,39]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan jam kerja PKL yang tidak teratur dan tidak menentu, bisa sepanjang tahun atau bersifat musiman [39] serta jam kerja PKL tidak diatur layaknya sektor formal [38].

Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan, lama usaha, dan kondisi sosial ekonomi. PKL dapat dilakukan oleh mayoritas laki-laki [39] atau mayoritas perempuan [38]. PKL didominasi oleh usia produktif yang berada pada usia kerja [38,39]. Tingkat pendidikan yang dimiliki PKL menunjukkan pada kondisi pendidikan yang rendah [38,39]. Pekerjaan PKL dilakukan oleh penduduk lokal maupun migran yang memiliki motivasi mencari pendapatan [38,39]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan [38,39]. Lama usaha PKL bervariasi mulai di bawah 1 tahun hingga 11 tahun [39]. Kondisi sosial ekonomi PKL berada dalam kondisi yang bervariasi, baik miskin maupun non-miskin [38].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi dan jenis organisasi. Terdapat PKL yang mengikuti organisasi ataupun tidak [39]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti PKL, yaitu koperasi [39]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [38]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi dan penertiban usaha yang beragam [38]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak kepada pemerintah kota sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [38].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, investasi, dan pembukuan. Terdapat 2 jenis pedagang PKL, yaitu pedagang independen (memproduksi komoditas sendiri) dan pedagang spekulasi (pedagang pengecer) [38,39]. Pedagang memiliki modal yang bervariasi, tetapi tergolong kecil dan terbatas [39]. Mayoritas pedagang kekurangan kredit formal sehingga mengandalkan kredit informal [39]. PKL memiliki penghasilan yang bervariasi [38]. Mereka juga melakukan berbagai jenis investasi dari penghasilannya [39]. Mayoritas PKL tidak melakukan pembukuan keuangan, jika ada maka hanya pembukuan keuangan sederhana [39]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan [38].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal) [38], hubungan dengan sektor informal (persaingan antar PKL) [38], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, konflik) [38], dan hubungan dengan masyarakat (hubungan ekonomi) [39].



Gambar 2. Konsep sektor informal dekade 1980-1989.

Pada konteks teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 1980-1989 memiliki hubungan langsung dengan teori pembangunan. Terdapat 1 konsep yang berkaitan langsung dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan penduduk migran dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL. Hal ini sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 yang menjelaskan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan peluang ekonomi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.

3.3 Konsep sektor informal dekade 1990-1999

Pembangunan dekade 1990-1999 diwarnai dengan berbagai eksternalitas pembangunan karena ketidaktepatan penerapan strategi pembangunan di dekade sebelumnya. Selain itu, kapitalisme global dan gerakan liberalisasi ekonomi dalam dekade ini telah menyebabkan reformasi neoliberal ekonomi di berbagai negara memicu perusahaan swasta menerapkan

sistem *outsourcing* yang memungkinkan sebuah perusahaan dapat dengan mudah mempekerjakan dan memecat pekerjanya, bahkan banyak perusahaan milik negara berkurang bahkan menghilang [25]. Dekade 1990-1999 juga diwarnai dengan terjadinya resesi ekonomi global yang menyebabkan inflasi, pengangguran yang tinggi, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan migrasi di perkotaan di berbagai negara, termasuk di Amerika Latin, Afrika Selatan, dan Asia. Semua kondisi tersebut telah menyebabkan kondisi sektor informal tetap ada [25,31].

3.3.1 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 dalam konsep ILO. Pada dekade 1990-1999 ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan, dan bentuk pasar. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh penduduk lokal dan migran [43,44], berbagai kelompok umur [45,46], berbagai latar belakang profesi seperti pengusaha baru dan orang yang berpindah pekerjaan [40,47], mudah dimasuki karena sedikit membutuhkan modal [47,48], dan tidak membutuhkan keterampilan khusus [46–48]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan adanya PKL yang menggunakan bahan baku dari lokal [47,49], dari wilayah sekitar (regional), dan impor [50]. PKL dalam aktivitasnya menggunakan bahan baku dari berbagai sumber [49].

Konsep struktur usaha ditunjukkan dengan kategori pengelolaan usaha dan kepemilikan usaha. Usaha PKL dapat dikelola sendiri, dikelola keluarga, atau dikelola dengan melibatkan orang lain [40,45,48–51]. Sementara itu, aset usaha atau sifat kepemilikan usaha PKL dapat dimiliki sendiri atau dimiliki oleh orang lain [43]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan modal yang kecil sehingga barang dan jasa yang ditawarkan PKL terbatas [40,44,45,47–49]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan PKL menggunakan teknologi yang diadaptasi dan merupakan teknologi padat karya, bahkan terkadang tidak menggunakan teknologi sama sekali [40,46,50]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan kategori asal keterampilan dan tingkat keterampilan. Asal keterampilan PKL diperoleh dari luar pendidikan formal [48]. Sementara itu, tingkat keterampilan yang dimiliki PKL merupakan keterampilan rendah karena tidak memiliki keahlian khusus [36,37,41,51].

Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan adanya jangkauan konsumen, jangkauan pelayanan, dan bentuk persaingan. PKL menjangkau konsumen tingkat ekonomi menengah-kebawah [40]. Jangkauan pelayanan PKL tidak teratur karena dapat melayani skala lokal, regional, dan nasional tergantung dari asal pembelinya [49]. Bentuk persaingan yang dihadapi PKL sangat bervariasi kepada sesama PKL ataupun toko formal [43,49,52].

3.3.2 Konsep sektor informal dekade 1990-1999 di luar konsep ILO. Pada dekade 1990-1999 ditemukan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang ditemukan dari unit amatan, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 3). Konsep keruangan ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [40,45–47,51]. PKL memanfaatkan ruang publik dengan luasan yang bervariasi [49].

Konsep fisik PKL ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, berupa barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [43,47,50]. Jenis sarana berdagang PKL bervariasi sesuai dengan jenis dagangan dan sifat pergerakan PKL yang menetap dan [43,45,46]. Konsep aktivitas PKL ditunjukkan dengan jam kerja PKL yang tidak teratur dan tidak menentu [40–43,45], serta tergantung pada kebebasan pedagang [46].

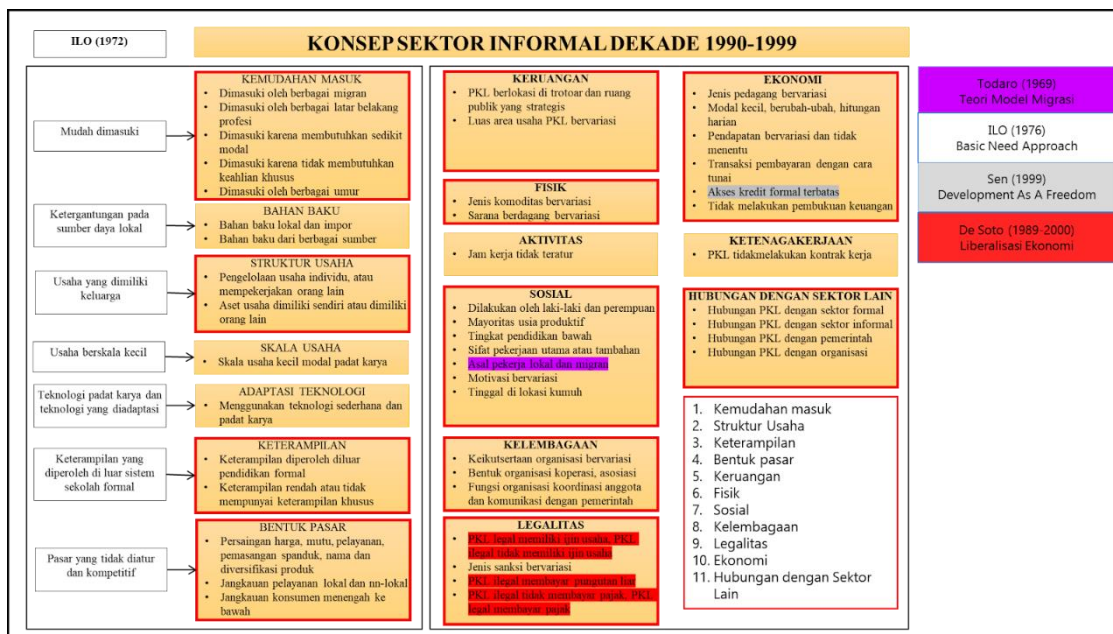
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, motivasi, dan tempat tinggal. PKL merupakan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [46,50]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif (*prime age*) [40,44,47,50], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [40,44,46,47,49] atau tidak memiliki pendidikan sama sekali [40,45]. PKL seringkali menjadikan usahanya sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan dengan lama usaha yang sangat bervariasi [50]. Orang-orang yang menekuni PKL merupakan migran dan sebagian lainnya warga setempat [43,44,50]. PKL menekuni usahanya karena memiliki motivasi yang beragam, tetapi utamanya memperoleh pekerjaan dan memiliki pendapatan karena minimnya lapangan kerja [43]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [40,47].

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan PKL yang mengikuti organisasi PKL ataupun tidak. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu koperasi ataupun asosiasi pedagang. Organisasi tersebut berfungsi mengorganisir PKL, forum komunikasi dengan pemerintah, dan kegiatan simpan pinjam [44,50]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [50]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi usaha yang beragam [53]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan liar) [53]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [50].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, modal, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran, dan pembukuan keuangan. Terdapat 2 jenis pedagang, yaitu pedagang memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer [50,52]. Modal usaha PKL tergolong kecil, berubah-ubah, dan dihitung harian [45]. PKL seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal [47–49]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tidak teratur dan dihitung harian [45], rata-rata pendapatan PKL dapat di bawah upah formal dan terkadang di atasnya [50]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [43,52]. Kebanyakan PKL tidak melakukan administrasi dan keuangan usaha [49]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan PKL tidak melakukan hubungan kontrak kerja kepada pihak lain yang biasanya diatur dalam aturan ketenagakerjaan [48].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal) [47], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban, izin berdagang, bantuan

usaha) [47,50], hubungan PKL dengan sektor informal (antar PKL, usaha rumahan dan kredit informal) [50], dan hubungan PKL dengan (paguyuban, koperasi) [40,44,50].



Gambar 3. Konsep sektor informal dekade 1990-1999.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 1990-1999 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, hanya beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian merupakan penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dengan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
2. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.
3. Kategori status legalitas usaha, jenis pungutan, dan pajak dalam konsep legalitas sangat terkait dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989. Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui pemberian izin menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Sebagai timbal baliknya, pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak sehingga berkontribusi dalam perekonomian formal.

3.4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009

Memasuki dekade 2000-2009 berbagai masalah pembangunan semakin memperjelas ketidaksempurnaan praktik pembangunan yang banyak dihadapi oleh negara berkembang.

Beberapa bentuk kegagalan itu karena tidak berhasilnya transformasi struktural dari negara berbasis pertanian (non-industri) ke negara industri sehingga menyebabkan cacat pembangunan seperti krisis ekonomi, pengangguran massal, dan migrasi yang tinggi dari pedesaan ke perkotaan [23]. Sektor industri yang seharusnya menyerap sebagian besar pekerja di sektor pertanian hanya mampu menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Sektor tersier yang diharapkan berkembang setelah terjadinya industrialisasi justru berkembang lebih awal dan mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal [51]. Pengangguran massal banyak terjadi di berbagai negara disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja maupun penutupan usaha di sektor industri karena berbagai faktor seperti sistem *outsourcing* tenaga kerja dan penggabungan beberapa perusahaan dan perampingan unit produksi. Setelah krisis keuangan tahun 1998, pertumbuhan sektor informal semakin tidak terkendali. Salah satu faktanya, yaitu terjadi lonjakan jumlah PKL di berbagai negara pada dekade 2000-2009 [41].

3.4.1. Konsep sektor informal dekade 2000-2009 dalam konsep ILO. Pada dekade 2000-2009 ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, dan keterampilan. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki karena tidak membutuhkan keterampilan khusus dan mudah dimasuki karena membutuhkan sedikit modal [41,51]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan PKL menggunakan bahan baku yang berasal dari lokal [51]. Konsep struktur usaha ditunjukkan pengelolaan usaha yang dilakukan secara individu [41,51]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan modal yang digunakan PKL sedikit sehingga perputaran usahanya juga kecil [23,51]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi sederhana dan padat karya [51]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan tingkat keterampilan PKL yang rendah dan asal keterampilan tersebut berasal dari luar pendidikan formal [41,51].

3.4.2. Konsep sektor informal dekade 2000-2009 di luar konsep ILO. Pada dekade 2000-2009 ditemukan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO yang ditemukan dari unit amatan, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 4). Konsep keruangan PKL ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [23,41]. Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan oleh PKL. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL sangatlah bervariasi, biasanya barang yang cepat terjual dan jasa yang relatif murah. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah beragam sesuai dengan jenis dagangan yang ditawarkan baik di tempat yang tetap (permanen) ataupun tidak tetap (keliling) dan kebanyakan menggunakan bangunan non-permanen [23,41]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat pergerakan dan jam kerja. Terdapat PKL yang beraktivitas secara menetap dan keliling [41]. Jam kerja PKL tidak teratur, tidak menentu, dan dinamis mengikuti aktivitas masyarakat kota. PKL dapat beraktivitas secara paruh waktu atau penuh baik siang dan malam [23,41].

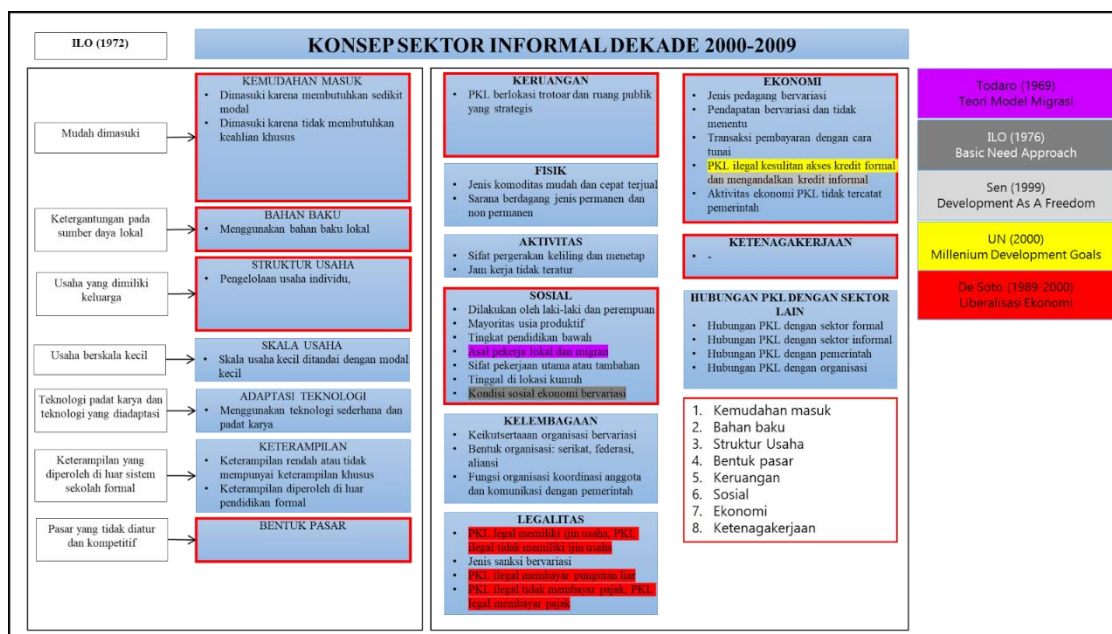
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi. PKL merupakan pekerjaan yang dapat

dilakukan oleh laki-laki dan perempuan [41]. Pelaku usaha PKL mayoritas berada pada usia yang produktif (*prime age*) [41], kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah [41,51]. Orang-orang yang menekuni usaha PKL merupakan migran dan sebagian lainnya warga setempat karena minimnya lapangan kerja [41]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan sumber penghasilan utama atau sebagai tambahan penghasilan [51]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [41]. Kondisi sosial ekonomi PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan.

Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [51]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu federasi, aliansi, atau serikat pedagang [41]. Organisasi tersebut berfungsi wadah koordinasi pedagang dan sebagai forum komunikasi dengan pemerintah [41,51]. Konsep legalitas PKL ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [23,41,51]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi usaha yang beragam [23,41]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (pungutan liar) [41,44]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [41].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran, dan pencatatan ekonomi. Terdapat 2 jenis pedagang, yaitu pedagang memproduksi komoditas sendiri dan pedagang pengecer yang memperoleh komoditas dari pihak lain [23,50,52]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal. Sementara itu, PKL legal mulai memperoleh manfaat akses kredit formal yang difasilitasi pemerintah [41]. Pendapatan PKL tergolong kecil dan tidak teratur, pendapatan rata-rata PKL biasanya di bawah upah formal dan terkadang dapat di atasnya [23]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [41]. Aktivitas ekonomi PKL tidak tercatat dalam statistik yang didokumentasikan dan dilaporkan oleh pemerintah [41].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal, kredit formal), hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban usaha, penarikan pajak), hubungan PKL dengan sektor informal (preman, kredit informal), dan hubungan PKL dengan organisasi (berupa serikat pekerja) [41].



Gambar 4. Konsep sektor informal dekade 2000-2009.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 2000-2009 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi dengan teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) dengan keterlibatan perempuan pada pekerjaan informal sangat relevan dengan isu perempuan yang tertuang dalam tujuan ke-3 MDGs, yaitu sebagai upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Asal tenaga kerja dalam konsep sosial menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan penduduk migran sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dengan tenaga kerja sektor informal juga dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi.
3. Kondisi sosial ekonomi atau kondisi kesejahteraan PKL dalam konsep sosial diukur dengan garis kemiskinan menunjukkan adanya relevansi dengan pendekatan strategi pembangunan pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* (BNA) yang dipopulerkan oleh ILO pada tahun 1976.
4. Status legalitas usaha, jenis retribusi, dan penarikan pajak dalam konsep legalitas sangat relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989 dan pada tahun 2000. Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui legalisasi usaha menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Sebagai timbal baliknya, pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi PKL tercatat oleh pemerintah sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi formal.

5. Akses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan dengan teori pembangunan sebagai kebebasan yang dikenalkan oleh Sen pada tahun 1999 [16]. Akses kredit formal merupakan salah satu cara untuk memberdayakan kemampuan seseorang dan membebaskan mereka dari lingkaran kemiskinan dengan cara memberikan fasilitasi ekonomi (*economic empowerment*) kepada masyarakat. Pemberian akses kredit formal kepada PKL juga selaras dengan tujuan MDGs yang ke-1, yaitu upaya memberantas kemiskinan secara komprehensif melalui berbagai bidang.

3.5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019

Masalah pembangunan di dekade 2010-2019 dipengaruhi oleh berbagai macam penerapan strategi pembangunan di masa lalu dan juga strategi pembangunan yang berkembang selama dekade 2010-2019. Eksternalitas pembangunan yang terjadi yang terjadi di negara berkembang telah menimbulkan berbagai persoalan, tetapi yang paling sering ditemui adalah langkanya kesempatan kerja, semakin sedikit pekerjaan formal yang diciptakan, dan lebih banyak penerapan sistem *outsourcing* pada kegiatan industri. Liberalisasi ekonomi juga semakin merubah struktur pasar tenaga kerja dengan terjadi deindustrialisasi yang meningkatkan lapangan kerja informal yang semakin tumbuh subur [19]. Pada dekade 2010-2019 diwarnai dengan perkembangan teori pembangunan, yaitu tujuan pembangunan milenium (MDGs) telah direvisi dan berganti menjadi *sustainable development goals* (SDGs). Kemunculan strategi *new urban agenda* (NUA) juga telah mengatur upaya-upaya mengatur agenda pembangunan perkotaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan [19,30].

3.5.1 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep-konsep sektor informal berdasarkan konsep ILO yang diperoleh dari unit amatan, yaitu kemudahan masuk, bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, dan keterampilan. Konsep kemudahan masuk ditunjukkan dengan PKL mudah dimasuki oleh laki-laki dan perempuan [29], tidak membutuhkan keterampilan khusus, membutuhkan sedikit modal [22,29,31], dan mudah dimasuki oleh berbagai latar belakang profesi [31,32]. Konsep bahan baku ditunjukkan dengan PKL menggunakan bahan baku yang berasal dari local, berbagai sumber, atau diproduksi sendiri [28,29].

Konsep struktur usaha ditunjukkan pengelolaan usaha yang dilakukan secara individu [28,42] atau dengan melibatkan orang lain [28]. Konsep struktur usaha juga ditunjukkan dengan kepemilikan usaha baik dimiliki oleh individu orang lain [31]. Konsep skala usaha ditunjukkan dengan modal yang digunakan PKL tergolong kecil sehingga perputaran usahanya juga kecil [22]. Konsep adaptasi teknologi ditunjukkan dengan penggunaan teknologi yang diadaptasi sederhana dan padat karya [22]. Konsep keterampilan ditunjukkan dengan tingkat keterampilan yang dimiliki PKL rendah [29] dan keterampilan tersebut diperoleh di luar pendidikan formal [31]. Konsep bentuk pasar ditunjukkan dengan berbagai bentuk persaingan untuk menghadapi pasar yang kompetitif [26,31].

3.5.2 Konsep sektor informal dekade 2010-2019. Pada dekade 2010-2019 ditemukan konsep-konsep sektor informal di luar konsep ILO, yaitu konsep keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain (lihat Gambar 5). Konsep keruangan PKL ditunjukkan dengan lokasi usaha PKL yang menempati ruang publik di perkotaan yang bersifat strategis [22,31].

Konsep fisik ditunjukkan dengan jenis komoditas dan jenis sarana berdagang yang digunakan oleh PKL. Komoditas yang ditawarkan oleh PKL bervariasi berupa barang dan jasa yang cepat terjual dan relatif murah [24,26,32,42]. Jenis sarana berdagang yang digunakan PKL sangatlah beragam sesuai dengan jenis dagangan [22,25]. Konsep aktivitas ditunjukkan dengan sifat pergerakan dan jam kerja. PKL beraktivitas secara menetap dan keliling [22,26,29]. Jam kerja PKL tidak teratur, tidak menentu, dan dinamis mengikuti aktivitas masyarakat kota. PKL dapat beraktivitas secara paruh waktu atau penuh baik siang dan malam, [25,29,42] dan tidak terbatas [28].

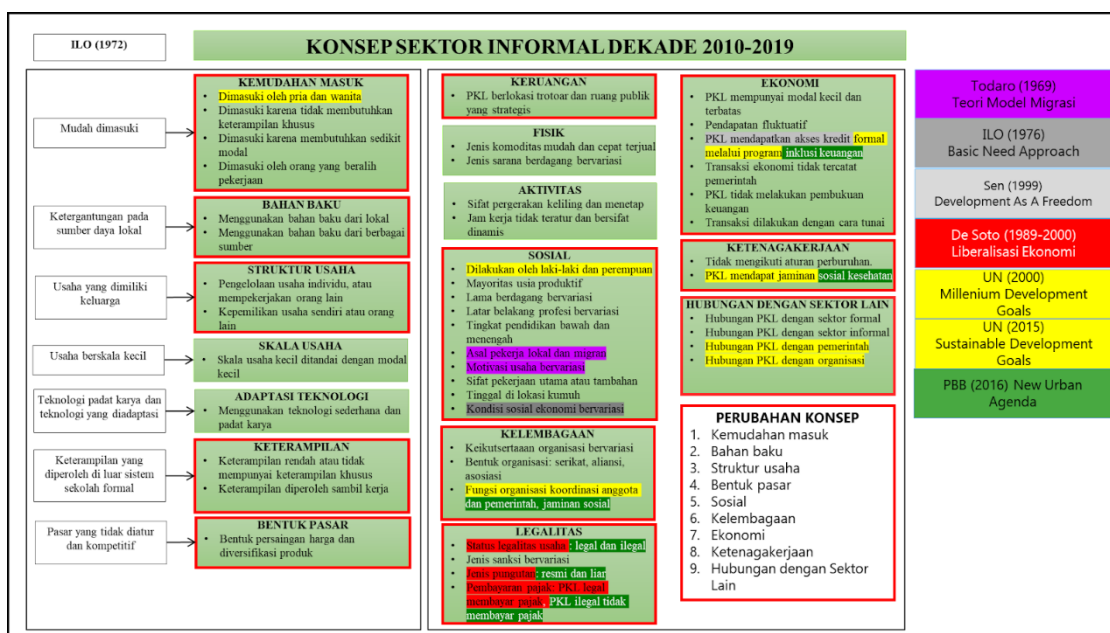
Konsep sosial ditunjukkan dengan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, asal pekerja, sifat pekerjaan, tempat tinggal, dan kondisi sosial ekonomi. PKL merupakan pekerjaan yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki [32] atau perempuan [22,25,30]. Usaha PKL dilakukan oleh orang berbagai usia namun mayoritas berada pada usia yang produktif (prime age) [25,26,29,32] dari berbagai latar belakang profesi [32], dari berbagai tingkat pendidikan, tetapi kebanyakan memiliki pendidikan yang rendah atau tidak memiliki pendidikan sama sekali [22,25,28,32]. Orang-orang yang menekuni usaha PKL merupakan migran dan warga setempat karena minimnya lapangan kerja [22,29,32,42]. Mereka menekuni usaha PKL dengan berbagai motivasi [32]. Pekerjaan PKL dapat dijadikan sumber penghasilan utama atau sebagai tambahan penghasilan [28,32]. PKL dapat menjalankan usahanya dengan lama usaha yang bervariasi [26,29,32]. PKL juga seringkali tinggal di lingkungan permukiman kumuh atau rumah yang tidak layak huni di perkotaan untuk menghemat biaya hidup [22,31].

Kondisi sosial ekonomi PKL sangatlah beragam, di bawah garis kemiskinan atau di atas garis kemiskinan [26,28]. Konsep kelembagaan ditunjukkan dengan keikutsertaan organisasi, jenis organisasi, dan fungsi organisasi. PKL seringkali mengikuti organisasi PKL ataupun tidak [25]. Bentuk organisasi yang seringkali diikuti, yaitu federasi, aliansi, atau serikat pedagang dan koperasi [22,25]. Organisasi tersebut berfungsi wadah koordinasi, advokasi pedagang, dan sebagai forum komunikasi dengan pemerintah [22,30,32]. Konsep legalitas ditunjukkan dengan status legalitas usaha, sanksi usaha, jenis pungutan, dan pembayaran pajak. Terdapat PKL dengan status usaha yang legal (memiliki izin) dan ilegal (liar) [22,25,26,29–31]. PKL ilegal seringkali mendapatkan sanksi dan konflik usaha yang beragam [22,25,26,29–31]. PKL juga seringkali menghadapi jenis pungutan resmi (retribusi) maupun tidak resmi (suap dan pungutan liar) [29,30,42]. PKL resmi (legal) yang membayar pajak sementara PKL ilegal tidak membayar pajak [28].

Konsep ekonomi ditunjukkan dengan jenis pedagang, akses kredit, pendapatan, cara pembayaran, dan pencatatan ekonomi. Terdapat 3 jenis pedagang, yaitu pedagang mandiri, pedagang sistem juragan, dan pedagang pengecer [26]. PKL ilegal seringkali kekurangan kredit

formal dan terpaksa mengakses kredit non-formal [22,28–31]. Sementara itu, PKL legal mulai memperoleh manfaat akses kredit formal yang difasilitasi pemerintah [25,29]. Pendapatan PKL tergolong kecil, tidak teratur dan fluktuatif [22,25,29], dapat dihitung harian, mingguan, atau bulanan [31] dan tidak terikat aturan upah minimum [42] sehingga dapat di atas atau di bawah upah rata-rata pekerja [32]. PKL melakukan transaksi ekonomi secara tunai maupun kredit kepada pemasok [28]. Pada umumnya, aktivitas ekonomi PKL tidak tercatat dalam pembukuan keuangan [28]. Aktivitas ekonomi PKL juga tidak tercatat dalam statistik yang didokumentasikan dan dilaporkan oleh pemerintah [22,26,31]. Konsep ketenagakerjaan ditunjukkan dengan aturan perburuhan dan jaminan sosial. PKL tidak mengikuti aturan perburuhan atau aturan ketenagakerjaan [26,28]. Pada beberapa kasus PKL tidak menikmati jaminan sosial dari pemerintah [31,42], tetapi juga terdapat PKL yang mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah [28].

Konsep hubungan dengan sektor lain ditunjukkan dengan hubungan PKL dengan sektor formal (toko formal, kredit formal) [28], hubungan PKL dengan pemerintah (penertiban usaha, bantuan usaha, jaminan sosial) [28], hubungan PKL dengan sektor informal (pedagang informal, industri rumahan) [28,29], dan hubungan PKL dengan organisasi (aliansi, asosiasi dan koperasi) [22,25,42].



Gambar 5. Konsep sektor informal dekade 2010-2019.

Pada konteks perkembangan teori pembangunan, tidak seluruh konsep sektor informal dekade 2010-2019 memiliki keterkaitan langsung dengan konsep pembangunan, tetapi terdapat beberapa konsep sektor informal yang memiliki keterkaitan langsung atau relevansi berbagai teori pembangunan, yaitu:

1. Kategori mudah dimasuki oleh jenis kelamin dalam konsep kemudahan masuk dan kategori jenis kelamin dalam konsep sosial terkait langsung dengan tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan keterlibatan tenaga perempuan pada pekerjaan informal sangat relevan dengan isu perempuan yang termuat dalam tujuan ke-3 MDGs dan tujuan ke-5 MDGs, yaitu upaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2. Kategori asal tenaga kerja dan kategori motivasi pekerja dalam konsep sosial yang menunjukkan bahwa sebagian pekerja PKL merupakan penduduk migran dengan berbagai motivasi menekuni usaha PKL sangat relevan dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969. Tenaga kerja sektor informal dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah yang bermigrasi ke perkotaan karena dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dengan peluang ekonomi di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.
3. Kategori kondisi sosial ekonomi dalam konsep sosial memiliki keterkaitan dengan dengan strategi pemenuhan kebutuhan dasar atau *basic needs approach* (BNA) oleh ILO pada tahun 1976. Kondisi sosial ekonomi PKL sering diukur menggunakan garis kemiskinan.
4. Kategori status legalitas usaha, kategori jenis pungutan, dan kategori penarikan pajak dalam konsep legalitas sangat relevan dengan teori liberalisasi ekonomi yang dikenalkan oleh de Soto sejak tahun 1989 dan pada tahun 2000. Sektor informal PKL yang diformalkan oleh pemerintah melalui legalisasi usaha menjadikan PKL sebagai usaha yang legal. Selain itu juga relevan dengan agenda perkotaan baru (NUA) yang dikenalkan oleh PBB pada tahun 2016. Formalisasi sektor informal merupakan agenda dalam NUA dalam rangka menuju perekonomian formal demi tercapainya agenda perkotaan baru yang inklusif kepada semua golongan masyarakat. Sebagai timbal baliknya, pemerintah memiliki keuntungan dengan menarik retribusi dan pajak. Selain itu, aktivitas ekonomi PKL tercatat sebagai ekonomi formal oleh pemerintah sehingga berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi formal.
5. Kategori fungsi organisasi dalam konsep kelembagaan, kategori jaminan sosial dalam konsep ketenagakerjaan, dan kategori hubungan PKL dengan organisasi dalam konsep hubungan dengan sektor lain memiliki relevansi dengan agenda perkotaan baru atau *new urban agenda* (NUA). Berbagai organisasi didorong untuk terlibat memberi layanan perlindungan sosial (program jaminan sosial), akses ke keterampilan, akses layanan ekonomi (akses kredit), dan layanan lainnya melalui organisasi yang mendukung sektor informal demi tercapainya agenda perkotaan baru yang inklusif dan berkelanjutan kepada semua masyarakat di perkotaan, termasuk kepada pelaku sektor informal. Pemberian jaminan sosial berupa asuransi kesehatan kepada PKL juga terkait langsung dengan tujuan yang ke-3 SDGs, yaitu menjamin hidup yang sehat dan meningkatkan kesehatan/kesejahteraan bagi semua pada semua usia.
6. Kategori akses kredit dalam konsep ekonomi sangat relevan tujuan pembangunan sebagai kebebasan, tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Pada tujuan pembangunan sebagai kebebasan, pemberian akses kredit merupakan fasilitas ekonomi yang berperan sebagai *economic empowerment*. Pemberian akses kredit formal selaras dengan tujuan MDGs yang ke-1, yaitu upaya memberantas kemiskinan melalui berbagai bidang. Akses kredit juga sejalan dengan

tujuan SDGs ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menciptakan pekerjaan yang produktif dan layak bagi semua.

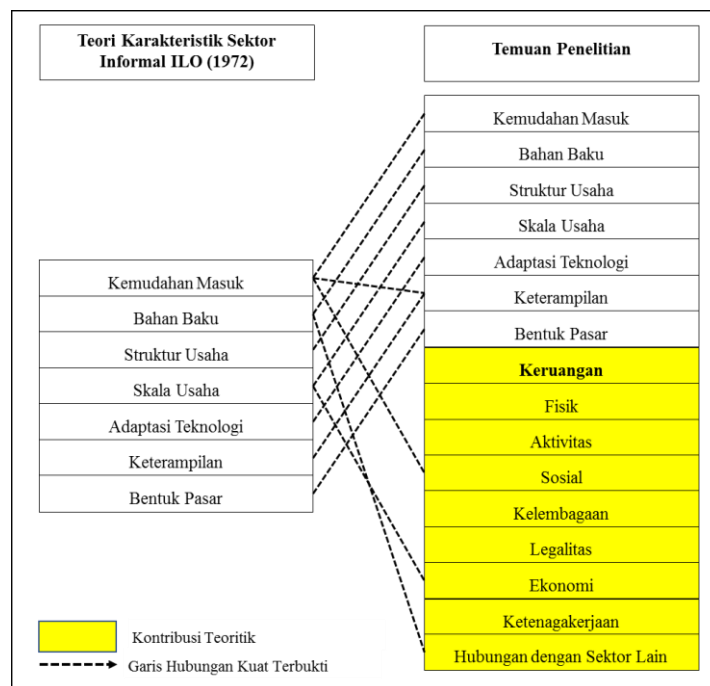
3.6. *Temuan penelitian*

Berdasarkan hasil analisis konsep sektor informal dari dekade 1971-1979 hingga dekade 2010-2019 dapat dilihat proses evolusi konsep sektor informal terjadi seiring dengan evolusi teori pembangunan yang ditunjukkan oleh hubungan keterkaitan langsung antara konsep sektor informal dengan konsep teori pembangunan yang dapat dilihat pada Gambar 6.

1. Pada dekade 1971-1979 dan dekade 1980-1989, konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan *basic need approach* (BNA) ILO tahun 1976.
2. Pada dekade 1990-1999 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan *basic need approach* (BNA) ILO tahun 1976. Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989.
3. Pada dekade 2000-2009 konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan *basic need approach* (BNA) ILO tahun 1976. Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan sebagai kebebasan Sen tahun 1999 dan MDGs tahun 2000.
4. Pada dekade 2010-2019 konsep kemudahan masuk memiliki keterkaitan langsung dengan MDGs tahun 2000 dan SDSs tahun 2015. Konsep sosial memiliki keterkaitan langsung dengan teori model migrasi Todaro tahun 1969 dan *basic need approach* (BNA) ILO tahun 1976. Konsep kelembagaan memiliki keterkaitan langsung dengan NUA tahun 2016. Konsep legalitas memiliki keterkaitan langsung dengan teori liberalisasi ekonomi De Soto tahun 1989 dan NUA tahun 2016. Konsep ekonomi memiliki keterkaitan langsung dengan teori pembangunan sebagai kebebasan Sen tahun 1999, MDGs tahun 2000, SDGs tahun 2015, dan NUA tahun 2016. Konsep ketenagakerjaan memiliki keterkaitan langsung dengan MDGs tahun 2000, SDGs tahun 2015 dan NUA tahun 2016. Konsep hubungan dengan sektor lain memiliki keterkaitan langsung dengan NUA tahun 2016.

Evolusi konsep sektor informal juga ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep sektor informal menurut ILO tahun 1972 dengan konsep sektor informal dekade 1970-1979 hingga dekade 2010-2019. Konsep sektor informal menurut ILO tahun 1972 yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ditunjukkan dengan 7 kriteria, yaitu kemudahan masuk, asal bahan baku, struktur usaha, skala usaha, adaptasi teknologi, keterampilan usaha, dan bentuk pasar. Akan tetapi, konsep sektor informal PKL pada dekade 1971-1979 hingga dekade 2010-2019 ditunjukkan dengan adanya kemunculan 9 kriteria konsep sektor informal PKL di luar konsep ILO, yaitu keruangan, fisik, aktivitas, sosial, kelembagaan, legalitas, ekonomi, ketenagakerjaan, dan hubungan dengan sektor lain sehingga secara keseluruhan terdapat 16 konsep sektor informal. Selain adanya tambahan konsep baru, juga terdapat keterkaitan antar kriteria yang memiliki hubungan yang kuat. Kriteria kemudahan masuk memiliki hubungan

kuat dengan kriteria keterampilan dan kriteria sosial. Kriteria bahan baku memiliki hubungan kuat dengan kriteria hubungan PKL dengan sektor lain. Kriteria skala usaha memiliki hubungan kuat dengan kriteria ekonomi. Temuan penelitian ini menjadi kontribusi teoritik dalam menyempurnakan teori sektor informal.



Gambar 6. Temuan penelitian dalam teori sektor informal menurut ILO (1972).

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap adanya evolusi konsep sektor informal yang sejalan dengan evolusi teori pembangunan. Proses evolusi konsep sektor informal dapat dilihat dengan semakin banyak konsep sektor informal yang memiliki hubungan keterkaitan langsung dengan teori pembangunan dari 1971-1979 hingga dekade 2010-2019. Bentuk evolusi konsep sektor informal juga dapat ditunjukkan dengan konsep awal sektor informal oleh ILO tahun 1972 yang terdiri dari 7 kriteria, tetapi hingga dekade 2010-2019 konsep sektor informal telah berkembang hingga menjadi 16 kriteria. Evolusi teori pembangunan ditunjukkan dengan perubahan dimensi pembangunan dari konsep pembangunan yang bersifat sektoral menuju konsep pembangunan yang lebih komprehensif.

Terkait dengan sektor informal, konsep dan praktek pembangunan pada awal dekade 1970-an hingga dekade 1980-an cenderung merespon keberadaan sektor informal di perkotaan dengan pembiaran, kurangnya dukungan, atau bahkan dengan upaya menghilangkan dari ruang kota. Namun, konsep dan praktek pembangunan pada dekade 1990-an hingga 2010-an mulai merespon sektor informal dengan mengakui dan mengintegrasikan keberadaannya di ruang kota sesuai dengan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan

berbagai kebijakan dan program pembangunan, seperti legalisasi usaha, peningkatan akses kredit formal, dan pemberian jaminan sosial meskipun keberadaannya banyak menempati ruang publik kota.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah dengan membangun konsep sektor informal yang komprehensif. Pemerintah dapat membuat formulasi kebijakan yang tepat berdasarkan keadaan terkini sektor informal sehingga diharapkan sektor informal mampu memberikan manfaat bagi semua *stakeholder*. Pemerintah juga harus mengintegrasikan penanganan sektor informal ke dalam perencanaan tata ruang kota. Keberadaan sektor informal yang sering memanfaatkan ruang publik kota sebagai ruang usaha perlu diantisipasi dengan penanganan yang tepat dengan mengakomodasi ke dalam rencana kota. Ketidakpedulian sikap pemerintah terhadap keberadaan sektor informal dapat mengganggu fasilitas ruang publik dan berbagai bentuk eksternalitas negatif lain yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL seperti kemacetan, berkurangnya keindahan, dan kebersihan bahkan menurunkan citra kota.

Referensi

- [1] Hidayat. Peranan Sektor Informal dalam Perekonomian Indonesia. *Econ Financ Indones* 1978;26:415–45.
- [2] Chaudhuri, Sarbajit, Mukhopadhyay U. *Revisiting the Informal Sector: A General Equilibrium Approach* 2013.
- [3] International Labour Organization. *Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya*. Geneva: International Labour Organisation; 1972.
- [4] Akhyat A. Dualisme Ekonomi Pada Kredit Rakyat di Yogyakarta Pada Tahun 1912-1990. *J Hum* 2015;27:252–62. <https://doi.org/10.22146/jh.v27i2.8716>.
- [5] Permana HA. *Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Luas Lahan Sawah di Pulau Jawa*. Universitas Pasundan, 2019.
- [6] Yunisvita. Transformasi Struktur Ketenagakerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. *J Ekon Pembang* 2011;9:90–9.
- [7] Puspitasari AW. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Migrasi Sirkuler ke Kabupaten Semarang*. Universitas Diponegoro, 2010.
- [8] Budiman A, Brata WS. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1995.
- [9] Suharto. Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan. *J Ekon Pembang* 2001;6:73–89.
- [10] Susilowati SH, Bonar MS, Wilson HL, Erwidodo. Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia : Analisis Simulasi dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi. *J Agro Ekon* 2007;25:11–36. <https://doi.org/10.21082/jae.v25n1.2007.11-36>.
- [11] Overseas Development Institute. *Basic Needs*. London: 1978.
- [12] Watson DD. *Poverty and Basic Needs*. *Encycl Food Agric Ethics* 2014:1–8. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6167-4_442-1.
- [13] Emmerij L. *The Basic Needs Development Strategy*. *World Econ Soc Surv* 2010:1–3.

- [14] Fauzi N. Membangun Jaringan Intelektual Neoliberal : Kasus Hernando de Soto 2006.
- [15] Darmawan E, B LR, Pratama DK, P AI, A KE. Review Buku The Mystery of Capital Bab 2–5 Rahasia Kejayaan Kapitalisme Barat Hernando De Soto. Yogyakarta: 2016.
- [16] Sen A. Development as Freedom: An India Perspective. *Indian J Ind* 2006;42:157–69.
- [17] Stalker P. Kita Suarakan Millennium Development Goals Demi Pencapaiannya Indonesia. Jakarta: 2007.
- [18] Ishartono, Raharjo ST. Sustainable development goals. *Soc Work J* 2016;6:154–272. <https://doi.org/10.14512/gaia.28.2.1>.
- [19] Chen MA, Roever S, Skinner C. Urban Livelihoods : Reviewing The Evidence in Support of The New Urban Agenda. *Environ. Urban.*, WIEGO Organisation; 2016, p. 89–102.
- [20] Nation U. Resolution Adopted by the General Assembly on 23 December 2016 2017.
- [21] Amin ATMN. The Informal Sector in Asia from the Decent Work Perspective. Geneva: 2017.
- [22] Bhowmik SK. Street Vendors in the Global Urban Economy. New Delhi: Routledge; 2010.
- [23] Bromley R. Street Vending and Public Policy: A Global Review. *Int J Sociol Soc Policy* 2000;20:1–28. <https://doi.org/10.1108/01443330010789052>.
- [24] Roever S. Informal Trade Meets Informal Governance: Street Vendors and Legal Reform in India, South Africa, and Peru. *Cityscape A J Policy Dev Res* 2016;18:27–46.
- [25] Roever S. Street Trade in Latin America: Demographic Trends, Legal Issues, dan Vending Organisations in Six Cities. *Str. Vendors Glob. Urban Econ.*, New Delhi: Routledge; 2010, p. 208–40.
- [26] Walsh J. Street Vendors and the Dynamics of the Informal Economy: Evidence from Vung Tau, Vietnam. *Asian Soc Sci* 2010;6:159–65.
- [27] Safitri R. Hubungan Sosial, Ekonomi, dan Spasial Antara Sektor Formal dan Sektor Informal di Kota Pekanbaru 2011.
- [28] Martinez LM, Estrada D. Street Vending and Informal Economy: Survey Data from Cali, Colombia. *Data Br* 2017;14:132–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.06.047>.
- [29] Bhowmik SK, Saha D. Financial Inclusion of the Marginalised Street Vendors in the Urban Economy. New Delhi: SpringerIndia; 2013. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-81-322-1506-6>.
- [30] Roever S, Skinner C. Street vendors and cities. *Environ Urban* 2016;28:1–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1177/0956247816653898>.
- [31] Gamielien F, van Niekerk L. Street Vending in South Africa: An Entrepreneurial Occupation. *South African J Occup Ther* 2017;47:24–9. <https://doi.org/dx.doi.org/10.17159/2310-3833/2017/vol47n1a5>.
- [32] Huang G, Zhang H, Xue-Desheng. Beyond Unemployment: Informal Employment and Heterogeneous Motivations for Participating in Street Vending in Present-Day China. *Urban Stud* 2017;55:2743–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177%2F0042098017722738>.
- [33] Salamah S, Muta;ali L. Analisis Pemanfaatan Ruang Oleh Aktivitas Pedaganag Kaki Lima (PKL) di Koridor Jalan Dipati Ukur Kota Bandung. *J Bumi Indones* 2019:1–13.

- [34] White MD, Marsh EE. Content Analysis: A Flexible Methodology. *Libr Trends* 2006;55:22–45. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1353/lib.2006.0053>.
- [35] Mayring P. *Qualitative Content Analysis: Theoretical Foundation, Basic Procedures and Software Solution* 2014.
- [36] Noble AG, McGee TG, Yeung YM. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. vol. 69. Ottawa: Ottawa International Development Research Center; 1979. <https://doi.org/10.2307/214894>.
- [37] Bromley R. Organization, Regulation and Exploitation in the So-Called ‘Urban Informal Sector’: The Street Traders of Cali, Colombia.’ *World Dev* 1978;6:1161–71. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(78\)90070-0](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(78)90070-0).
- [38] Natrass NJ. Street Trading in Transkei—A Struggle Against Poverty, Persecution, and Prosecution. *World Dev* 1987;15:861–75. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X\(87\)90039-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90039-8).
- [39] Ramli R. *Kesempatan Kerja Pedagang Kaki Lima pada Wilayah Ciputat Pasar, Kabupaten Tangerang Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor, 1984.
- [40] Firdausy C. *Pengembangan sektor informal pedagang kaki lima di perkotaan*. Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995.
- [41] Bhowmik SK. Street Vendors in Asia : A Review. *Econ Polit Wkly* 2005:2256–64.
- [42] Pitoyo AJ. *Dinamika Sektor Informal Di Indonesia Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro*. Populasi 2007;18.
- [43] Soen’an ADC. *Perilaku Sektor Informal Pedagang Kaki Lima dalam Pemasaran*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 31–45.
- [44] Nadjib M. *Segi-Segi Sosial Budaya dan Etos Kewiraswastaan di Kalangan Pedagang Kaki Lima*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 77–92.
- [45] Hermanto Z. *Gambaran Umum Potensi dan Masalah Ekonomi dan Sosial Sektor Informal di Perkotaan*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 7–19.
- [46] Pitoyo AJ. *Pedagang Kaki Lima Pada Masa Krisis*. Populasi 2016;10:73–97. <https://doi.org/10.22146/jp.12485>.
- [47] Firdausy CM. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 139–56.
- [48] Resmi ET. *Mobilitas Usaha Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 61–75.
- [49] Sukesu H. *Akses Pasar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima*. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 47–60.
- [50] Timothy DJ, Wall G. *Selling to Tourists: Indonesian Street Vendors*. *Ann Tour Res* 1997;24:322–40. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(97\)80004-7](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)80004-7).

- [51] Assan JK, Chambers T. India's Street Vendors and the Struggle to Sustain Their Livelihoods and Informal Enterprises: Unionization, Political Action and Sustainable Development. *Int J Dev Sustain* 2014;3:2140–61.
- [52] Hamid A. Karakteristik Ekonomi Usaha dan Cara Pedagang Kaki Lima dalam Meningkatkan Usaha. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 21–30.
- [53] Astuty ED. Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lingkungan dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Daerah. Pengemb. Sekt. Informal Pedagang Kaki Lima di Perkota., Jakarta: Dewan Riset Bappenas & Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan LIPI; 1995, p. 109–21.